

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana hukuman terhadap pelaku pelanggaran *illegal logging* di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2003 dalam perspektif fikih jinayah?

Data penelitian dihimpun melalui fakta yang ada di lapangan dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Kemudian, penulis menggunakan literatur untuk menganalisis dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegiatan menebang, memungut, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi dengan surat izin di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro telah melanggar peraturan daerah Jawa Timur nomor 4 tahun 2003 tentang pengelolaan hutan. Dan bagi pelakunya dapat dikenai hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan pasal 61 peraturan Daerah Jawa Timur nomor 4 tahun 2003.

Hukum pidana Islam memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan *jarimah*. *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan kegiatan pelanggaran *illegal logging* masuk dalam *Jarimah Ta'zir* (hukuman yang tidak tercantum ketentuannya dalam nash dan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terinci). Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya, oleh karena itu penetapan hukumannya adalah wewenang '*ul al-amri* (penguasa) berdasarkan kemaslahatan umat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka melihat dampak dari penebangan hutan secara liar tersebut maka perlu adanya suatu cara untuk mencegahnya. Seperti melakukan pembenahan terhadap sistem hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan serta bimbingan atau penyuluhan kepada penduduk setempat tentang betapa pentingnya keberadaan hutan.